

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Apeldorn, L. J. Van, 2004, *Pengaturan Ilmu Hukum, Cetakan XXX*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener.
- Eko Prasajo, et. al. , 2007, *Deregulasi dan Debirokrasi Perizinan Di Indonesia*, cet 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1996, *Organisasi : Prilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gronroos Cristian, 1990, *Service Management and Marketing : A Momentum of Truth*, MaxwellMacmillan Intenational, Singapore.
- Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Perdata*, cet. 1, Jakarta.
- Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby, 2000, *manajemen kualitas dan kompetitif* Terjemahan Mohammad Musa, Fajar Agung, Jakarta.
- Manulang, M. dan Sragian L.D, 1971, *Ilmu Ekonomi I*, Sinar Harapan, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992, *Reiventing Government: How the Entreoreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison Weslet Publishing Company inc Osborne and Gaebler.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Memahami Kepastian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratminto dan atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar,.

Sardjono, Agus, 2014, et. al., *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Zaenal Markomi dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2018, *Manajemen Pelayanan Publik*, cet. 1, CV. Pustaka Setia, Jakarta.

## 2. Perundang-undangan

Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### 3. Internet :

Besar, Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 September 2018, pukul 20.09 WIB.

Darmian Nasution, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr), OSS diakses pada hari sabtu tanggal 8 desember 2018, pukul 18.20.

Hamalatul Qurani, “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses hari kamis 13 desember, pukul 19.20.

Khazanah, Jeremy Bentham, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 413, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375>, diakses pada tanggal 22 September 2018 pukul 15.02 WIB.

Lembaga OSS, Pengertian OSS, <https://www.oss.go.id/oss/>, diakses pada hari sabtu tanggal 8 desember 2018, pukul 16.35.

Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Online, <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2>, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, diakses hari selasa tanggal 16 oktober 2018, pukul 00.04.

Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Implementasi Pp 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*, <https://www.oss.go.id/oss> diakses pada hari senin tanggal 21 januari 2019, pukul 19.00.

Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Pengelolaan Sistem Oss Kepada Bkpm*, <https://www.oss.go.id/oss>, diakses pada hari senin tanggal 21 januari 2019, pukul 19.30.

Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pelayanan Sistem OSS Mulai Beroperasi di BKPM Awal Tahun 2019*, <https://www.ekon.go.id/press/view/siaran-pers-pelayanan.4471.html> , diakses pada hari Rabu tanggal 23 januari 2019, Pukul 18.32.

